

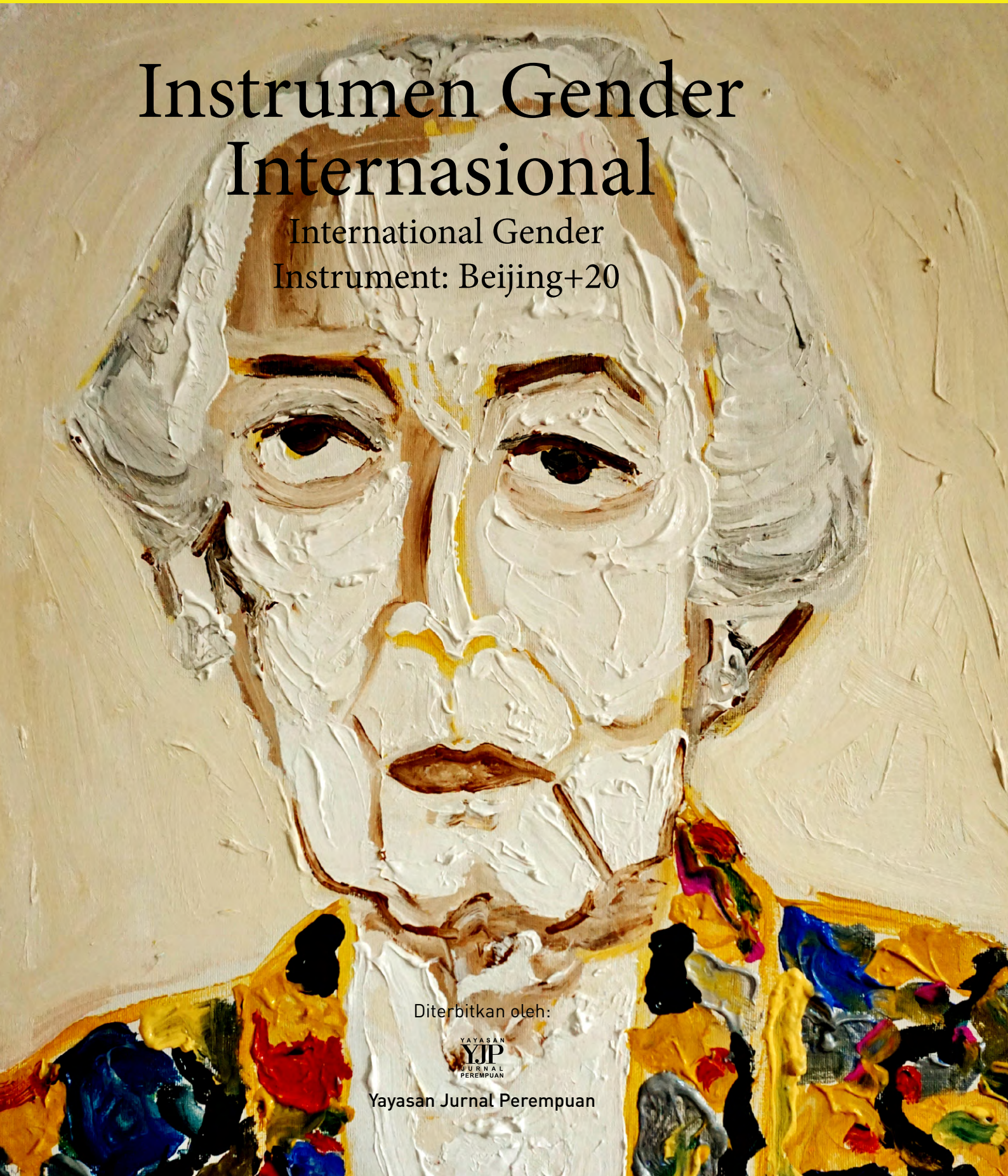
# Instrumen Gender Internasional

International Gender  
Instrument: Beijing+20

Diterbitkan oleh:

YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan



# Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp.9200,- Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya beroleh kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 sahabat Jurnal Perempuan. Gabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp. 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan dan Jurnal Perempuan Muda secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- BCA KCP Menteng a.n Gadis A. Effendi, No. Rekening: 7350454416**

**- Bank Mandiri cabang Tebet Raya a.n Yayasan Jurnal Perempuan, No. Rekening 124-00-0497988-7**

(Mohon bukti transfer difaks ke 021 83706747, attn: Andri Wibowo/Gerry)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)

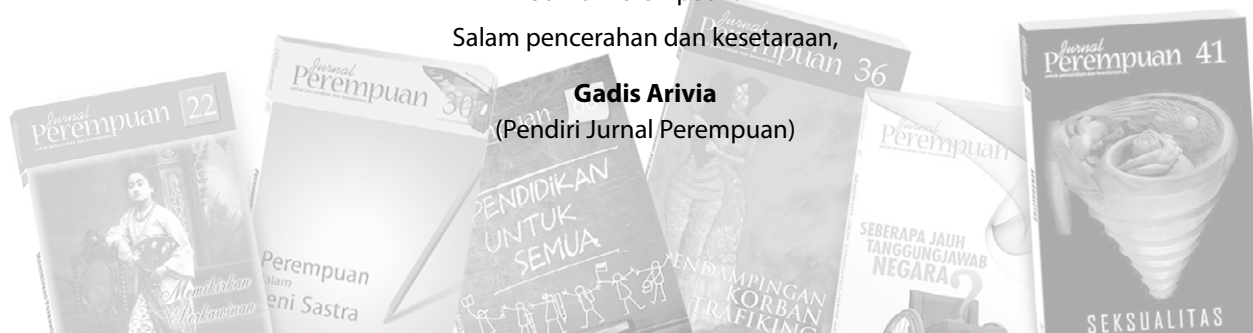
Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Mariana Amiruddin (Hp 08174914315, email: [mariana@jurnalperempuan.com](mailto:mariana@jurnalperempuan.com)) dan Deedee Achriani (Hp 0818730289, email: [deedee@jurnalperempuan.com](mailto:deedee@jurnalperempuan.com)).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada setiap tanggal 1 setiap bulannya di website kami [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org) dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

**Gadis Arivia**

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

**PENDIRI**

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno  
Ratna Syafrida Dhanny  
Asikin Arif (Alm.)

**DEWAN PEMBINA**

Melli Darsa, S.H., LL.M.  
Mari Elka Pangestu, Ph.D.  
Svida Alisjahbana

**PEMIMPIN REDAKSI**

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

**DEWAN REDAKSI**

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)  
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)  
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)  
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)  
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)  
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)  
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)  
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)  
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

**MITRA BESTARI**

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)  
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)  
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)  
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)  
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)  
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)  
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)  
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)

Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)

Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)

Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

**REDAKSI PELAKSANA**

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

**SEKRETARIS REDAKSI**

Andi Misbahul Pratiwi

**SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN**

Himah Sholihah  
Andri Wibowo  
Hasan Ramadhan  
Abby Gina Boangmanalu

**DESAIN & TATA LETAK**

Agus Wiyono

**ALAMAT REDAKSI :**

Jl. Lontar No. 12 - Menteng Atas,  
Setiabudi - Jakarta Selatan 12960  
Telp. (021) 8370 2005 (hunting)  
Fax: (021) 8370 6747  
Email: [yjp@jurnalperempuan.com](mailto:yjp@jurnalperempuan.com)  
[redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)

**WEBSITE:**

[www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)

Cetakan Pertama, Mei 2015



**FORDFOUNDATION**

## Daftar Isi

<b>Catatan Jurnal Perempuan: Apa Kabar Hak Asasi Manusia Perempuan?</b> .....	iii-iv
<b>Artikel / Articles</b>	
• Membumikan Instrumen HAM Internasional: Kajian Kebijakan Hukum yang Melanggar Hak Perempuan / <i>Disseminating International Human Rights Instruments: a Study of Legal Policies that Violates Women's Human Rights</i> .....	81-89
<i>R. Valentina Sagala</i>	
• Apakah ACWC (Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak)? Kajian Instrumen Kebijakan Internasional / <i>What is ACWC (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children)? A Study on the International Policy Instruments</i> .....	91-98
<i>Yuyun Wahyuningrum</i>	
• Status Anak Perempuan dalam Kovenan Internasional: Kajian Advokasi Perkawinan Anak / <i>Status of Girls under International Covenants: a Study of Advocacy of Child-Marriage</i> .....	99-105
<i>Maria Ulfah Anshor</i>	
• Perempuan Membongkar Diplomasi Senyap Beijing+20 & CSW59 New York: Kajian Diplomasi Internasional Ramah Perempuan / <i>Women Disassembling Silent Diplomacy of Beijing+20 &amp; New York CSW59: a Study of Woman-Friendly International Diplomacy</i> .....	107-114
<i>Dwi Ruby Kholifah</i>	
• Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial: Kajian Kovenan Internasional atas Perdagangan Perempuan / <i>Criminalization of Sexual Workers: a Study of International Covenants on Women's Trafficking</i> .....	105-121
<i>Lorensia Brahmana</i>	
• Perdagangan Perempuan dalam Migrasi Internasional: Kajian Diplomasi Indonesia dan Malaysia / <i>Trafficking of Women in International Migration: a Study of Indonesia and Malaysia Diplomacy</i> .....	123-131
<i>Masthuriyah Sa'dan</i>	
• Memperkuat Instrumen Gender dan Agensi Perempuan: Studi Kasus Resiko Bencana di Indonesia, Filipina, dan Korea Selatan / <i>Strengthening Gender Instrument and Women's Agency: a Study of Disaster Risks in Indonesia, Philippine, and South Korea</i> .....	133-138
<i>Dian Lestariningsih</i>	
• Perempuan Buruh Dalam Pasar Internasional: Cinta Ibu, Agensi dan Keragaman Politik Aktivisme / <i>Women's Labors in International Market: Mother's Love, Agency and Plurality of Activism Politics</i> .....	139-147
<i>Dewi Candraningrum</i>	
<b>Wawancara / Interview</b>	
• Patrick Ziegenhain: "Perlu Peningkatan Ekonomi, Perubahan Administratif dan Pola Pikir Sosial Untuk Memperbaiki Status Perempuan di Asia Tenggara" / <i>Patrick Ziegenhain: "The need to increase economy, administrative reformation, and changes of mindset to improve the status of South East Asian women"</i> .....	149-152
<i>Anita Dhewy</i>	
<b>Kata dan Makna / Words and Meanings</b> .....	153-154
<b>Profil / Profile</b>	
• Retno Marsudi: "Diplomasi All-Out Untuk Lindungi Buruh Migran Perempuan" / <i>Retno Marsudi: "All-out diplomacy to protect Indonesian female migrant workers"</i> .....	155-159
<i>Anita Dhewy</i>	
<b>Resensi Buku/ Book Review</b>	
• Pentingnya Memahami Instrumen Gender / <i>Importance of Understanding International Gender Instruments</i> .....	161-164
<i>Lola Loveita</i>	

## Apa Kabar Hak Asasi Manusia Perempuan?

**D**alam *Jurnal Perempuan Edisi 45 Sejauh Mana Komitmen Negara?* JP mengkaji peletakan dasar dan instrumen CEDAW (Convention on the Elimination of Discrimination Against Women) menjadi penanda awal bagi peta awal perlawanan atas diskriminasi gender. Indonesia merupakan salah satu anggota dari 188 negara lainnya. Instrumen legal ini merupakan peta dan jalan untuk melawan fragmentasi hukum internasional yang masih mendiskriminasi separuh penduduk dunia, yaitu perempuan. Kekerasan terhadap perempuan mengambil bentuk dasarnya dalam diskriminasi, yang kemudian beroperasi menjadi kekerasan. Sampai dengan tahun 2015 ini visibilitasnya masih mengalami gangguan seperti dalam peringatan Deklarasi dan Platform Aksi Beijing+20 (UNWomen Report: <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/12/>). Ban Ki-moon me-miliki komitmen kuat dalam menyampaikan pesannya bahwa perihal ini telah, sedang dan akan menjadi perhatian penuh dalam Post 2015 dan kerangka pembangunan berkelanjutan (baca SDGs – *Sustainable Development Goals*). Setidaknya 17.000 partisipan dan 30.000 aktivis memenuhi pembukaan Konferensi Dunia Perempuan ke-4 di Beijing pada September 1995. Tujuan mereka adalah satu, yaitu kesetaraan gender dan pemberdayaan atas perempuan secara global. 20 tahun setelah itu, di tahun 2014 ini mereka berkumpul kembali dalam Aksi Platform Beijing+20. Prioritas pertama yang menjadi perhatian dunia adalah 1) Perempuan dan Lingkungan, disamping 12 isu kritis yang menjadi perhatian, yaitu 2) Perempuan dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan; 3) Anak Perempuan; 4) Perempuan dan Ekonomi; 5)

Perempuan dan Kemiskinan; 6) Kekerasan terhadap Perempuan; 7) Hak Asasi Manusia dari Perempuan; 8) Pendidikan dan Training Perempuan; 9) Mekanisme Institusional untuk Kemajuan Perempuan; 10) Perempuan dan Kesehatan; 11) Perempuan dan Media; 12) Perempuan dan Daerah Konflik (UN Women Reports, Beijing+20: <http://beijing20.unwomen.org/en/about>).

Platform Aksi Beijing+20 membayangkan tentang perempuan dan anak-anak perempuan yang mendapatkan kebebasan dan pilihan dan menyadari hak-haknya serta terbebas dari kekerasan, baik ketika ke sekolah, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan juga bayaran yang setara ketika bekerja. Aksi ini merupakan usaha untuk menampakkan yang tak terlihat (*the invisible*) bahwa perempuan mendapatkan beban paling berat dari ketidakadilan sosial ekonomi dan politik. Yang memperparah kondisi ini adalah akses terhadap “hak” dan pengetahuan kesehatan reproduksi dan seksual amat minim. Di samping kemunduran tersebut, kehidupan dan pemajuan hak-hak perempuan di Indonesia sejak sepuluh tahun terakhir juga menunjukkan pelbagai kemajuan dan capaian sebagai berikut sebagai turunan dari Kovenan Internasional: 1) Undang-Undang No.23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak. 2) Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 4) Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. 5) Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. 6) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 7) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban. 8) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia. 9) Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. 10) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 11) Peraturan Empat Kementerian, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kementerian Perlindungan

dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak No. 105 Tahun 2008 tentang Anggaran berperspektif Gender. 12) Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di area konflik. Pada edisi ini, Jurnal Perempuan 85 hendak mengulas aspek-aspek tersebut dalam pelbagai matra kajian. (*Pemimpin Redaksi: Dewi Candraningrum*)

# Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015

## Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

---

R. Valentina Sagala. Institut Perempuan. Jl. Dago Pojok  
No.85, Cobleng, Kota Bandung, Jawa Barat 40135.  
Phone:0815-9074-798

### **Membumikan Instrumen HAM Internasional: Kajian Kebijakan Hukum yang Melanggar Hak Perempuan**

#### **Disseminating International Human Rights Instruments: a Study of Legal Policies that Violates Women's Human Rights**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 81-89, 1 tabel, 9 daftar  
pustaka.

This paper examines human rights including women's human rights (women's rights), the adoption of the *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*, and other international human rights instruments. Referring to CEDAW's principles together with human rights principles, States are urged to create law that promotes women's perspective. Unfortunately until now, there are many policies and laws, at any levels—national and province/district/city—discriminate against women. Regarding this, this paper will focus to list on Bills which become the advocacy priority for women's movement in Indonesia.

Keywords: women's rights, CEDAW, feminist legal theory and practices.

Tulisan ini mengkaji perkembangan hak asasi manusia (HAM) meliputi hak asasi perempuan (HAP), kelahiran *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*, dan instrumen hukum internasional lainnya. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip CEDAW yang melengkapi prinsip-prinsip HAM, negara didorong untuk mewujudkan hukum yang berperspektif perempuan. Namun sayangnya hingga saat ini, di Indonesia, berbagai produk hukum dan kebijakan masih diskriminatif terhadap perempuan. Diskriminasi ini terjadi tidak hanya di tingkat nasional, namun juga pada peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Kajian ini mengkhususkan diri pada Undang-Undang (Rancangan Undang-Undang) yang tengah menjadi agenda perjuangan gerakan perempuan di Indonesia saat ini.

Kata Kunci: hak asasi perempuan, CEDAW, hukum berperspektif perempuan.

---

Yuyun Wahyuningrum. Penasihat Senior mengenai ASEAN &  
HAM. Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia

### **Apakah ACWC (Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak)? Kajian Instrumen Kebijakan Internasional**

#### **What is ACWC (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children)? A Study on the International Policy Instruments**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 91-98, 13 daftar pustaka.

ASEAN has established a commission specialised in advancing and protection rights of women and children in Hanoi Vietnam on 7 April 2010. This commission is called ACWC (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children). This paper investigates and narrates its history, challenges and hindrance being faced to advance human rights. It argues that despite all the obstacles, ACWC has crucial potential to increase women and children participation as well as state and community to advance human rights in ASEAN.

Keywords: ASEAN, ACWC, Women, Child.

ASEAN mendirikan sebuah mekanisme hak asasi manusia yang memiliki spesialisasi pada pemajuan dan perlindungan hak perempuan dan anak pada tanggal 7 April 2010 di Hanoi, Viet Nam. Komisi ini dinamakan ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children atau ACWC. Artikel ini membahas perkembangan ACWC sejak ia didirikan, tantangannya ke depan dan kans apa saja yang dimilikinya untuk meningkatkan upaya perlindungan hak perempuan dan anak di kawasan. Artikel ini berargumentasi bahwa meskipun ACWC didirikan dengan segala keterbatasan dan dinamikanya, badan ini bisa memiliki potensi untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan di ASEAN.

Kata kunci: ASEAN, ACWC, perempuan, anak.

---

Maria Ulfah Anshor. Komisioner Komisi Perlindungan Anak  
Indonesia (KPAI). Jl. Teuku Umar No.10, Menteng, Kota Jakarta  
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350. Phone:(021)  
31901556

### **Status Anak Perempuan dalam Kovenan Internasional: Kajian Advokasi Perkawinan Anak**

#### **Status of Girls under International Covenants: a Study of Advocacy of Child-Marriage**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 99-105, 9 daftar pustaka.

In Beijing Platform Action (BPFA) in 1995, one of the twelve critical issues is the girl-child. Referring to the reality in many countries that girls from an early age are treated discriminately and harmfully into practices such as female genital mutilation, sex selection before the baby is born, even the killing of female infants, violence against girls, child marriage, sexual exploitation, sexual abuse, discrimination against girls in provision, protection, & participation and other discriminatory practices, such as regarding the health and welfare facilities for girls. This paper will examine Indonesia's efforts to reduce the marriage of girls.

Keywords: international covenants, girls, child-marriage.

Dalam *Beijing Platform Action* (BPFA) tahun 1995, salah satu dari dua belas isu kritis adalah anak perempuan (*the girl child*). Merujuk pada realitas di banyak Negara bahwa anak perempuan sejak usia dini mendapat perlakuan diskriminatif dan praktek-praktek yang merugikan anak perempuan seperti pengrusakan alat kelamin anak-anak perempuan termasuk sunat perempuan, pemilihan jenis kelamin sebelum bayi lahir, bahkan pembunuhan terhadap bayi-bayi perempuan, kekerasan terhadap perempuan, pernikahan anak, eksploitasi seksual, penyalahgunaan seksual, diskriminasi terhadap anak perempuan dalam pemberian makanan dan praktik diskriminasi lainnya, seperti menyangkut fasilitas kesehatan dan kesejahteraan bagi anak-anak perempuan. Tulisan ini akan mengkaji usaha Indonesia dalam mereduksi perkawinan anak-anak perempuan.

Kata kunci: kovenan internasional, anak perempuan, perkawinan anak.

Dwi Ruby Kholifah. Delegasi CSO untuk CSW 59 New York.  
AMAN Indonesia. Jl. Jatipadang II No. 18 A Pasar Minggu  
Jakarta Selatan. Telp/ Fax : +62 21 7892870

### **Perempuan Membongkar Diplomasi Senyap Beijing+20 & CSW59 New York: Kajian Diplomasi Internasional Ramah Perempuan**

#### **Women Disassembling Silent Diplomacy of Beijing+20 & New York CSW59: a Study of Woman-Friendly International Diplomacy**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 107-114, 6 daftar pustaka.

This paper examines a comprehensive picture of women's advocacy in Beijing+20 and Commission on the Status of Women 59 New York that spoke against silence-diplomacy led by Indonesian government. Indonesia was seen as most democratic Muslim country in the World by the UN. Yet Indonesia was not promoting works in human rights maximally, especially the advancement of women's rights and children's rights. Women's Movement to advocate the previous two international meetings had successfully opened-up a more women-friendly advocacy to advance status of women and children under international gender instruments.

Keywords: Beijing+20, CSW 59 New York, Women-friendly Diplomacy.

Kajian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif tentang advokasi gerakan perempuan dalam membongkar diplomasi senyap Indonesia pada Review Beijing +20 di tingkat Asia Pasifik maupun global yaitu di Sidang PBB Commission on the Status of Women (CSW) Sesi 59 di New York. Indonesia dipandang sebagai negara Muslim paling demokratis di dunia, dengan kepemimpinan baru yang mengusung rakyat sebagai sentral dari perubahan sangat ditunggu kepemimpinannya oleh dunia, terutama berbicara tentang pemajuan HAM perempuan dan anak. Sayangnya, Indonesia lebih banyak memilih diam bahkan ketika ditafsirkan sebagai negara yang menolak gagasan progresif terkait dengan pemajuan HAM perempuan dan anak perempuan. Gerakan Perempuan Peduli Indonesia untuk Beijing +20 berhasil membongkar diplomasi "senyap" Indonesia, dengan dialog intensif sebagai bagian dari delegasi CSW 59.

Kata kunci: Beijing+20, CSW 59 New York, Diplomasi Ramah Perempuan.

Lorensia Brahmana. Universitas Padjajaran & Caritas Indonesia.  
Jl. Raya Bandung Sumedang Km. 21, Jatinangor, Jawa Barat  
45363. Phone:(022) 84288828

### **Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial: Kajian Kovenan Internasional atas Perdagangan Perempuan**

#### **Criminalization of Sexual Workers: a Study of International Covenants on Women's Trafficking**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 115-121, 9 daftar pustaka.

This article looks into the actions taken by the Government of Indonesia to follow up the integration of the points of the Beijing Platform +20 into national instruments such as legislation products, law, and public policy based on gender equality in accordance with suppressing women trafficking particularly the exploitation of prostitution pinpointed by the Beijing Platform +20. It will also discuss gender injustice as the root of women's trafficking. Women exploitation in prostitution still can not be addressed optimally by the government because of gender inequality in legal structure and system. Besides, the implementation is still based on gender-biased value and construction of sexuality in patriarchal society.

Keywords: Commercial Sex, Women, Trafficking.

Tulisan ini membahas tentang sejauh mana tindak lanjut pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan poin-poin Platform Aksi Beijing +20 ke dalam Instrumen nasional yakni produk-produk legislasi, hukum, dan kebijakan pemerintah yang berkeadilan gender dalam memberantas perdagangan perempuan khususnya terkait eksploitasi prostitusi sebagai salah satu aspek yang menjadi seruan dalam Platform Aksi Beijing +20. Tulisan ini akan membahas bagaimana ketidakadilan gender sebagai akar terjadinya perdagangan perempuan. Keberlangsungan eksploitasi perempuan dalam dunia prostitusi belum bisa ditangani secara maksimal oleh pemerintah disebabkan karena masih ada ketidakadilan struktur dan sistem dalam hukum yang disebabkan oleh gender. Selain itu, praktek implementasi hukum dan undang-undang masih menyerap nilai-nilai konstruksi seksualitas yang cenderung bias gender dalam masyarakat patriarki.

Kata kunci: komersialisasi seks, perempuan, perdagangan manusia.

Masthuriyah Sa'dan. . Pengajar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.  
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta  
55281. Phone:(0274) 589621

### **Perdagangan Perempuan dalam Migrasi Internasional: Kajian Diplomasi Indonesia dan Malaysia**

#### **Trafficking of Women in International Migration: a Study of Indonesia and Malaysia Diplomacy**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 123-131, 1 gambar, 1 tabel, 16 daftar pustaka.

The lack access in knowledge, education, training and economic factor has made women and girls become prone-victims of trafficking. Malaysian Govt has reported that 4.268 sex commercial workers are coming from Indonesia. They are mostly trafficked via the borders of Malaysia and Indonesia. To cut the chain of violence, it is necessary to cut the whole syndicate of traffickers instead of one trafficker. International diplomacy between Indonesia and Malaysia is hoped to foster the reduction of human trafficking, specifically women and girls as way to advocate international gender instruments.

Keywords: trafficking, International diplomacy, Indonesia-Malaysia.

Minimnya akses pengetahuan dan pendidikan dan faktor ekonomi yang menghimpit membuat perempuan dewasa dan anak-anak perempuan menjadi korban *trafficking*. Sebagaimana yang dilaporkan oleh pemerintah Malaysia, bahwa 4.268 pekerja seks komersial di Malaysia berasal dari Indonesia. Dengan demikian memutus mata rantai kejahatan kemanusiaan tidak bisa hanya dengan prioritas satu oknum saja, melainkan memutus mata rantainya dari sumber perekrutan sindikat perdagangan manusia yaitu perekrut tenaga kerja. Diplomasi internasional yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Malaysia dengan cara program pemulangan tenaga kerja Indonesia dan penyaluran tenaga kerja melalui satu jalur yakni jalur pintu legal merupakan upaya advokasi pemerintah atas pemenuhan hak-hak perempuan dalam instrumen gender internasional.

Kata Kunci: perdagangan manusia, diplomasi Internasional, Indonesia-Malaysia.

---

Dian Lestariningsih. PolGov, FISIPOL, Universitas Gadjah Mada. SosioYustisia Bulaksumur, Jogjakarta 55281. Telepon: (0274) 563362

**Memperkuat Instrumen Gender dan Agensi Perempuan:  
Studi Kasus Resiko Bencana di Indonesia, Filipina, dan  
Korea Selatan**

**Strengthening Gender Instrument and Women's Agency: a  
Study of Disaster Risks in Indonesia, Philippine, and South  
Korea**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 133-138, 3 gambar, 18 daftar pustaka.

UNDP 2004 has reported that 75% of the world inhabit a high-risk disaster-prone area. Oxfam 2005 has narrated that during the tsunami attacking Indonesia and other countries, 77% casualties were women and girls. This facts shall strengthen the understanding of international gender instrument that support those who are vulnerable during disaster. Indonesia has impotant task to work and cooperate among multistakeholders such as government, communities, CSOs, NGOs, mass medias, etc to reduce disaster-risks. Indonesia should also pay more attention to promote women's agency in reducing disaster-risks.

Keywords: gender instrument, disaster, women, agency.

Laporan UNDP (2004) memperkirakan sekurangnya 75% penduduk bumi hidup di daerah yang berisiko bencana. Oxfam (2005) melaporkan bahwa pada Tsunami Samudera Hindia terdapat 77 % korban meninggal adalah perempuan. Melihat makin tingginya kepedulian publik pada pengurangan risiko bencana dan tumbuhnya solidaritas di Indonesia, maka pekerjaan rumah yang utama adalah bagaimana memastikan bahwa pemahaman instrumen gender di Indonesia khususnya dalam pengurangan risiko bencana semakin baik di tiap level bagi multipeihak; pemerintah, masyarakat sipil, komunitas bisnis, akademisi dan media. Di sisi lain, perlu adanya upaya untuk mendukung promosi keagenan perempuan dalam pengurangan risiko bencana yang lebih masif lagi.

Kata Kunci: instrumen gender, bencana, perempuan, agensi.

---

Dewi Candraningrum. Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan & Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jl. Lontar No. 12, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12960. Telp: 021-83702005, Faks: 021-83706747

**Perempuan Buruh Dalam Pasar Internasional: Cinta Ibu,  
Agensi dan Keragaman Politik Aktivisme**

**Women's Labors in International Market: Mother's Love,  
Agency and Plurality of Activism Politics**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 139-147, 33 daftar pustaka.

Activism of international women's labors does not deal with one version of global action yet manifesting in pluralism of actions with divergent and different forms. Many faces of Asia-Pacifics women's movements, for example, are having multiple expressions in engaging with emancipatory politics at all levels. Effort to generalize their fights, resistance, and resilience will at the end reduce the capacity of their political movement in terms of framework, tradition, generation, ethnicity and nationalism. Women are collectively challenging the injustice, violence, and inequality by demonstrating differences which are linguistically, geographically and culturally defined. Thus, flexibility of action and resilience is the best cure to patriarchy.

Keywords: women labors, international market, activism.

Aktivisme perempuan buruh internasional tidak sedang berurusan dengan satu versi aksi global, tetapi keberagaman aksi, dengan pola yang divergen dan saling terbedakan. Beragam kelompok perempuan di Asia Pasifik misalnya, dan yang lainnya, memiliki ekspresi yang beragam dalam keterlibatan mereka dalam politik emansipatoris di semua level. Usaha untuk menggeneralisasikan perjuangan dan resistensi perempuan-perempuan ini, demikian juga, ketahanan mereka, akan mereduksi politik gerakan dalam kerangka, tradisi, generasi, etnisitas dan nasionalisme. Secara kolektif perempuan melawan kesewenangan, penindasan, ketidakadilan dengan mendemonstrasikan perbedaan yang kaya baik secara geografis dan secara ekspresi linguistik. Fleksibilitas aksi dan ketahanan aksi kemudian amat ditakuti oleh dunia patriarki.

Kata Kunci: perempuan buruh, pasar internasional, aktivisme.





**Retno Marsudi:**  
**“Diplomasi All-Out Untuk Lindungi Buruh Migran Perempuan”**

*Retno Marsudi: “All-out diplomacy to protect Indonesian female migrant workers”*

**Anita Dhewy**

Redaksi Jurnal Perempuan

[anita@jurnalperempuan.com](mailto:anita@jurnalperempuan.com)

**R**etno Lestari Priyansari Marsudi mencatat sejarah dalam peta kepemimpinan di Kementerian Luar Negeri ketika terpilih sebagai Menteri Luar Negeri Perempuan Pertama dalam Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla pada akhir Oktober 2014. Sebagai Menteri Luar Negeri ke-18, Retno memiliki sejumlah pengalaman menjadi yang pertama. Selain menjadi Menteri Luar Negeri perempuan pertama dalam sejarah Indonesia, Ia juga merupakan duta besar perempuan pertama Indonesia untuk kerajaan Belanda. Pendahulunya 20 laki-laki dan sebagian berlatar belakang militer. Sebelumnya, posisinya sebagai Direktur Jenderal Amerika dan Eropa menempatkannya sebagai perempuan pertama

dalam sejarah Kementerian Luar Negeri yang menduduki jabatan tinggi tersebut. Ketika bertugas sebagai Dubes di Norwegia, Retno bahkan mendapat penghargaan *Order of Merit* dari Raja Norwegia pada Desember 2011 dan membuatnya menjadi warga negara Indonesia pertama yang menerima tanda jasa tersebut. Dengan posisinya sebagai diplomat karier, boleh dikatakan Retno memiliki pengalaman yang sangat kaya untuk memimpin institusi yang menjadi garda depan diplomasi Indonesia. Akhir Maret 2015 Jurnal Perempuan berbincang dengan Retno Marsudi di kantornya di kawasan Pejambon di sela-sela jadwal kerjanya yang sangat padat. Kami berbincang ketika jam istirahat siang tentang sejumlah hal seperti

kebijakan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, upaya perlindungan warga negara khususnya buruh migran perempuan dan pengalamannya menggeluti dunia diplomasi ditemani alunan gending Jawa.

### **Pengarusutamaan Gender di Kementerian Luar Negeri**

Tentang isu pemberdayaan perempuan (*women empowerment*) di Indonesia, Retno berpandangan bahwa pemerintah Indonesia sudah mengarusutamakan isu tersebut di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah, artinya sebagai kebijakan, tidak ada diskriminasi terhadap perempuan, dan hal itu sudah sangat jelas. Komposisi kabinet yang memberikan tanggung jawab cukup besar kepada perempuan sebagai menteri yakni sekitar 25% dan posisi menteri luar negeri yang dipercayakan kepada perempuan untuk pertama kali adalah fakta yang menarik. Retno menceritakan pada saat dirinya dilantik oleh presiden Jokowi, ia banyak sekali mendapatkan telepon dari menteri luar negeri negara lain dan mereka memberikan apresiasi serta sangat menghargai pilihan tersebut. Menurut Retno fakta ini seperti mematahkan anggapan sebagian orang yang memandang bahwasanya Islam tidak bisa sejalan dengan isu pemberdayaan perempuan namun Indonesia membuktikan hal itu tidak terjadi, mengingat menteri luar negeri kita adalah seorang perempuan dan jabatan menteri luar negeri merupakan jabatan yang sangat ekspos keluar. Lebih lanjut Retno mengatakan hal ini juga memperlihatkan bahwa pengarusutamaan isu tentang pemberdayaan perempuan sudah menjadi kebijakan. Selain itu fakta bahwa dari 32 orang menteri 8 orang diantaranya perempuan dengan menteri luar negeri seorang perempuan, merupakan sinyal yang sangat kuat yang berusaha disampaikan oleh pemerintah Indonesia ke luar.

Sementara untuk konteks Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Retno menyampaikan sejak 7 hingga 10 tahun yang lalu dalam setiap proses perekrutan diplomat-diplomat baru, lebih kurang 50 persennya adalah perempuan. Menurut Retno ini adalah satu tren yang baru, yang tidak terjadi pada saat dirinya masuk ke Kementerian Luar Negeri. Ketika ia masuk Kemlu, teman seangkatannya berjumlah 70 orang dan sekitar 10 persennya adalah perempuan. Dengan kenaikan persentase hingga 50 persen menurut Retno hal ini juga menunjukkan bahwasanya dalam profesi yang dipotret orang sebagai profesi laki-laki pun,

perempuan bisa berperan 50% diantaranya dan hasilnya perempuan-perempuan tersebut bagus. Ia sendiri mengaku selama menjalani profesinya sebagai diplomat, ia tidak pernah mengalami satu pengalaman dimana dirinya merasakan didiskriminasi oleh teman-teman laki-lakinya. Jadi menurut Retno ia cukup yakin bahwa untuk konteks Indonesia, baik dalam hal kebijakan maupun implementasi terkait pemberdayaan perempuan, tidak ada masalah.

Saat ditanya sejauh ini bagaimana penerjemahan pengarusutamaan gender di internal Kemlu, perempuan kelahiran Semarang, 27 November 1962 ini memaparkan sejumlah kebijakan yang sudah dan akan diambil. Ia menjelaskan jika dulu seorang diplomat menikah dengan diplomat, maka salah satu harus *give up*, sekarang tidak lagi, kedua-duanya bisa jalan terus. Jadi ada penghargaan terhadap individu. Jika dalam satu keluarga salah satu *give up*, artinya tidak ada penghargaan terhadap individu. Kondisinya saat ini Kemlu menghargai individu, sehingga kedua-duanya bisa penempatan, Kemlu mencoba mencari mereka penempatan yang paling dekat. Yang kedua, kebijakan-kebijakan Kemlu menurut Retno lebih menunjukkan keberpihakan kepada perempuan, misalnya saat ini pihaknya sedang membangun *daycare* supaya pasangan-pasangan muda yang memiliki anak tidak dihadapkan pada satu pilihan harus memilih mengorbankan anak atau mengorbankan karier. Situasi ini menurutnya perlu untuk difasilitasi supaya mereka tetap bisa bekerja tanpa harus mengorbankan atensi kepada anak, jadi anak ada yang mengawasi dan mereka juga tetap bisa memberikan *breastfeeding*, dsb. Selain itu Retno juga menjelaskan belum lama berselang Kemlu melakukan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) yang menyatakan bahwa kebijakan dan anggaran Kemlu menunjukkan keberpihakan kepada perempuan. Jadi menurut Retno kebijakan Kemlu sudah mengimplementasikan pengarusutamaan gender dan menunjukkan keberpihakan terhadap perempuan.

### **Diplomasi Perlindungan Buruh Migran Perempuan**

Bassina Farbenblum, et. al., dalam bukunya yang berjudul *Akses Buruh Migran Terhadap Keadilan di Negara Asal: Studi Kasus Indonesia* mengatakan selain Filipina, saat ini Indonesia mengirim lebih banyak tenaga kerja ke luar negeri daripada negara lain di Asia Tenggara. Mengacu pada data yang dilansir

Kemlu, Farbenblum mengatakan hingga Mei 2012, sekitar 2,4 juta orang tenaga kerja Indonesia tercatat secara resmi bekerja di luar negeri sebagai buruh migran, sementara sebagian lain yang tidak diketahui jumlahnya barangkali bekerja secara tidak resmi. Data Kemlu juga menyebutkan sebanyak 861.000 pekerja migran Indonesia terdaftar sebagai pekerja di wilayah Timur Tengah. Banyak buruh lainnya yang diyakini bekerja di Timur Tengah secara tidak resmi. Arab Saudi sampai saat ini masih merupakan tujuan yang paling populer bagi para buruh migran Indonesia di Timur Tengah. Salah satu temuan dalam studi yang dilakukan Farbenblum menunjukkan bahwa secara umum buruh migran yang bekerja di Timur Tengah menghadapi lebih banyak kesulitan daripada buruh migran di wilayah lain.

Ketika ditanya tentang proses diplomasi yang sejauh ini sudah dilakukan Kemlu terkait isu perlindungan buruh migran, Retno menjelaskan bahwa salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia adalah perlindungan terhadap warga negara Indonesia termasuk buruh migran Indonesia. Ia mengatakan dirinya terlibat langsung, sejak menjadi duta besar di Belanda ia banyak sekali menangani masalah yang terkait dengan buruh migran Indonesia. Retno mengaku mempunyai *passion* untuk membantu teman-teman WNI yang menghadapi masalah perburuhan atau ketenagakerjaan dan keimigrasian. Lebih jauh Retno mengatakan jika kita melihat peta buruh migran kita di luar, sebagian besar adalah perempuan dan itulah yang harus diproteksi. Oleh karena itu, menurutnya pemerintah menyatakan bahwa Indonesia hanya mengirimkan buruh migran Indonesia apabila ada dua syarat, pertama apabila di peraturan nasional negara tersebut terdapat perlindungan terhadap buruh migran asing atau yang kedua Indonesia memiliki MoU yang isinya adalah perlindungan terhadap buruh migran Indonesia. Dan absennya salah satu syarat tersebut berarti pemerintah tidak akan mengirimkan buruh migran kita karena jika hal itu tetap kita lakukan berarti kita membiarkan tidak adanya proteksi terhadap buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri yang sebagian besar adalah perempuan. Retno menegaskan, "Kalau itu *obvious*, dan *day to day* saya terlibat langsung di dalam masalah proteksi warga negara di luar termasuk diantaranya sebagian besar kan perempuan".

Retno juga mengatakan bahwa Kemlu benar-benar total dalam upaya menghadirkan negara untuk melindungi buruh migran termasuk untuk kasus-

kasus di Arab Saudi. Ia menambahkan bahwa tentunya kita juga harus paham bahwa setiap negara memiliki hukum nasionalnya masing-masing yang juga harus kita hormati. Tetapi diplomasi kita untuk perlindungan warga negara kita sudah sangat optimal dan bahkan menurut Retno kalau diperbandingkan dengan negara lain Indonesia sudah jauh melebihi apa yang dilakukan oleh negara-negara lain dalam perlindungannya kepada warga negara. Ia menjelaskan misalnya mengenai penyediaan *lawyer* untuk kasus-kasus hukum, dari awal Kemlu sudah melakukan pendampingan warga negara yang mengalami masalah hukum hingga proses hukumnya berakhir. Namun Kemlu tidak tahu suatu kasus akan berakhirnya dimana karena sekali lagi menurut Retno aturan setempatlah yang berlaku. Tetapi Kemlu selalu akan memastikan bahwa warga negara kita tidak dirugikan hak-hak hukumnya. Jadi menurut Retno jika pertanyaannya mengenai diplomasi Kemlu untuk memproteksi warga negara, ia menegaskan pihaknya *all out* dan karenanya ia memasukkan hal ini di dalam salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia.

Lebih lanjut Retno menjelaskan dalam kasus-kasus pembunuhan di Arab Saudi, buruh migran Indonesia yang dipidana mati hanya bisa dibebaskan apabila ada pemaafan dari keluarga. Faktor keluarga sangat menentukan, bahkan Raja Saudi pun tidak bisa melakukan intervensi kepada keluarga apabila keluarga tidak memberikan pemaafan. Di sinilah kita tidak bisa bergerak lagi kalau keluarga sudah mengatakan tidak. Walaupun dalam beberapa hal karena upaya KBRI maka akhirnya keluarga memberikan ampunan, banyak sekali kasusnya yang karena *deal*-nya KBRI, kita melakukan pendekatan kepada keluarga, dsb, maka akhirnya dimaafkan. Tetapi ada beberapa kasus dimana dari sejak awal keluarga sudah mengatakan kita tidak akan memberikan ampunan, kita dekati apapun, jawabannya tidak, tidak saya maafkan, maka kita tidak bisa apa-apa. Tapi pada saat keluarga tidak memaafkan, Retno mengingatkan, jangan kemudian dikatakan bahwa diplomasi kita gagal, itu tidak *fair*. Jika Kemlu sudah melakukan semua upaya, tapi pada satu titik, yakni titik keluarga tidak memaafkan, bagaimanapun upaya yang sudah kita lakukan, ya kita harus tunduk pada hukum setempat. "Kan sering orang mengatakan, oh diplomasi gagal, *that is not the case*", ungkap Retno. Ia menegaskan dirinya bisa memastikan semua timnya yang berada di luar negeri akan melakukan upaya yang *all out* untuk membela

dan melindungi warga negara kita tetapi tentunya ada aturan-aturan hukum setempat yang juga harus dihormati, sebagaimana di sini.

### Tentang Dunia Diplomasi dan Keluarga

Retno Marsudi memulai karier diplomatnya sejak tahun 1986 dengan menjadi staf di Biro Analisa dan Evaluasi untuk Kerjasama Asean. Lulusan Jurusan Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada ini menjadi Sekretaris I bidang ekonomi di Kedutaan Besar RI di Belanda pada 1997. Setelah empat tahun menduduki jabatan tersebut, pada 2001, ia ditunjuk sebagai Direktur Eropa dan Amerika, dan dipromosikan menjadi Direktur Eropa Barat pada tahun 2003. Ibu dari dua orang anak ini memperoleh gelar Master Hukum Uni Eropa dari Haagse Hogeschool Belanda ini diangkat menjadi duta besar Kerajaan Norwegia dan Republik Islandia pada 2005. Ia juga menempuh studi lanjut tentang HAM di Universitas Oslo. Pada 2008 Retno diminta kembali ke Jakarta untuk mengisi posisi sebagai Direktur Jenderal Amerika dan Eropa. Sebagai Dirjen ia bertanggung jawab mengawasi hubungan dan kerjasama Indonesia dan 82 negara di Amerika dan Eropa. Sebelum ditunjuk menjadi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Kerja oleh Presiden Joko Widodo, Retno bertugas sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda sejak 2012. Sebagai Dubes Retno fokus untuk meningkatkan hubungan dagang Indonesia-Belanda.

Retno mengaku portofolio sebagai menteri adalah portofolio yang sangat jauh, tetapi sejauh ini ia bisa *manage* dengan baik. Menurutnya banyak sekali pengalaman menarik yang dialaminya selama lima bulan jabatannya, hingga ia tidak bisa menyebutkan satu pengalaman yang paling menarik karena setiap hari ia selalu mengalami dinamika yang terus berganti. Seperti situasi yang sedang dialaminya saat ini dimana ia menjadi komandan untuk masalah evakuasi warga negara Indonesia yang ada di Yaman. Menurutnya hal ini mungkin sesuatu yang sangat menarik dilakukan oleh seorang perempuan, bagaimana ia melihat peta, mengetahui pergerakan pasukan ada dimana, kota mana yang paling aman, kita mengevakuasi kemana, berapa jaraknya, menggunakan jalur darat atau apa, lalu dari situ kita lari ke titik mana, dsb. Retno menuturkan dirinya sangat bersyukur karena timnya, yakni tim Kemlu dan tim teman-teman yang ada di luar sangat kuat dan yang juga menguntungkan dirinya karena komunikasi dan koordinasi antara dirinya dengan

kementerian-kementerian lain dalam hal ini misalnya dengan Panglima TNI sangat baik sehingga mempermudah upayanya dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya. Ia menambahkan bidang yang digelutinya adalah bidang yang sangat menarik untuk perempuan walaupun dinamikanya sangat tinggi, mobilitasnya sangat tinggi, yang mengharuskannya menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah. Jadi setiap hari ada dinamika yang selalu menarik.

Retno menuturkan yang menarik dari dunia diplomasi yang membuatnya terus bergelut di bidang ini adalah dinamikanya yang setiap hari berubah, juga tantangannya yang selalu baru dan yang ketiga dengan bergaul dengan banyak orang dan dengan banyak bangsa akan membuka wawasan kita dan dari pengalamannya cara pandang kita terhadap dunia pasti akan berbeda. Jadi bagi Retno pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat menarik dengan segala tantangannya. Dan tantangannya cukup besar, dimulai dengan masalah dirinya di dalam keluarga, *vis a vis* ia dengan pekerjaannya. Ia member contoh, misalnya ia baru kembali dari mendampingi presiden lawatan ke Jepang dan Tiongkok, ia baru kembali hari Sabtu tengah malam menjelang minggu dan hari ini ia sudah harus pergi lagi. Jadi ia di rumah hanya dua hari, lalu ia sudah harus pergi lagi. Nanti pada saat ia kembali, pasti akan ada lagi, dsb. Oleh karena itu baginya yang penting dari awal, pada saat ia mengawali karier dan mengawali rumah tangganya, yang paling penting adalah komunikasi, dengan suami tentunya. Namun untuk saat ini dimana sudah hampir 30 tahun ia berumah tangga, pola hubungannya dengan suami dan dengan anak-anak sudah tertata. Dan berbicara mengenai masalah *team work* dalam keluarga, menurut Retno sudah tidak relevan lagi jika pembagian tugas dalam keluarga didasarkan pada jenis kelamin, tugas suami atau tugas istri. Sebaliknya kita sudah harus betul-betul melebur, kecuali untuk hal-hal yang sifatnya memang tidak bisa dibagi dengan suami, seperti melahirkan dan menyusui yang merupakan tugas perempuan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi tugas-tugas lain masih bisa dilakukan secara *team work* dengan suami. Karena itu ia selalu bilang pada teman-temannya yang perempuan bahwa yang penting adalah membuat satu *team work* di dalam keluarga yang cukup kuat sehingga tidak ada pertanyaan seperti inikan tugas perempuan atau itukan tugas laki-laki, semuanya bisa dilakukan bersama.

Lebih jauh Retno mengungkapkan keluarganya adalah keluarga yang sangat demokratis, sangat terbuka. Dari awal ia mendidik anak-anaknya dengan mengajak mereka untuk paham apa yang akan mereka lakukan. Ia ajak mereka bicara bukan layaknya anak kecil, meski tentunya dengan cara berpikir anak kecil, jadi ia selalu mengatakan pada anak-anaknya bahwa apa yang kamu lakukan hari ini akan menentukan apa yang akan terjadi di hari depan. *If you do it wrong now, then you will get wrong in the future*. Seperti membangun rumah jika kamu meletakkan batubata yang kualitasnya jelek, oplosan semennya jelek, maka kamu akan mendapatkan rumah yang tidak kokoh, tapi kalau setiap kali kamu mau meletakkan batubata kamu memastikan bahwa batabata tersebut kualitasnya baik, dsb, insyaallah kamu akan dapat satu bangunan yang kokoh. Jadi anak-anak itu ia ajak bicara seperti itu sehingga apapun langkah yang mereka ambil, mereka akan menghitung. Dan ia juga selalu bilang, *"Your life is yours, it's not mine"*, kamu bertanggung jawab terhadap hidupmu, saya bukan, saya hanya berkewajiban memberikan apa yang seharusnya diberikan orang tua, pendidikan, dsb, dst, tetapi *your life is yours*".

Hal lain yang ia tekankan pada anak-anaknya adalah mengenai masalah kakak-beradik. Ia selalu bilang bahwa kamu hanya dua anak dan kami, dari hitungan umur, kami akan pergi lebih dulu, pada saat kami sudah pergi, kamu hanya punya satu saudara dan oleh karena itu kamu tidak ada pilihan kecuali kamu harus baik pada saudara kandungmu karena inilah hidupmu dengan saudaramu. Jadi dari kecil ia sangat jarang bahkan hampir tidak pernah melihat anak-anaknya bertengkar, mereka selalu *ngemong* dengan baik. Retno memiliki dua anak laki-laki dengan selisih umur 4,5 hampir 5 tahun. Ia mengaku mendidik anaknya yang nomor satu dengan sangat keras. Saat ini anaknya yang pertama berumur 26 tahun, bekerja di Boston Consulting Group dan Juni nanti rencananya akan ke Prancis untuk melanjutkan studi, ketika ia mulai bekerja, ia mengambil alih biaya sekolah adiknya. Walaupun orang tua masih diberi rezeki, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab kakak kepada adik, ia mengambil alih kewajiban tersebut. Sementara anaknya yang terakhir berumur 21 tahun, sarjana kedokteran dan sedang koas di UGM.

Tentang pola pendidikan anak ini, Retno mengatakan ia belajar dari ibunya. Ia mengaku ibunya seorang wanita Jawa yang sangat keras mendidik anaknya. Dulu ketika sekolah ia

mempunyai pola yang sangat *fixed*, jadi ia tidak pernah disuruh belajar. Ibunya mengatakan kalau kamu mau mendapatkan nilai tinggi ya kamu harus belajar. Dan itu juga yang ia tanamkan pada anaknya, kalau kamu mau dapat nilai yang bagus, kamu belajar, nggak ada sulapan kamu dapat nilai yang bagus. Jadi menurut Retno ibunya memang sangat-sangat disiplin terhadap dirinya dan ia belajar dari ibunya untuk menerapkan pendidikan kepada anak-anaknya. Ia bercerita, ketika kecil anak-anaknya selalu tidur sesuai jadwal, ketika sudah jam 8 malam, anak-anaknya akan menghampiri dirinya dan suaminya untuk mengucapkan *goodnight*, bersalaman dan pergi tidur, walaupun di rumah masih ada tamu misalnya. Jadi disiplin lalu mengajak anak merencanakan masa depannya sendiri dan orang tua hanya mengawasi dan selalu mengingatkan anak bahwa *your life is yours*, disitulah anak akan bertanggung jawab terhadap hidupnya.

Lalu sepanjang kariernya sebagai diplomat, siapa saja sosok atau tokoh yang berpengaruh terhadap kariernya? Retno mengatakan mendapatkan anugerah dibesarkan oleh orang-orang yang besar di dalam dunia diplomasi di Kemlu, walaupun mereka mendidiknya dengan sangat keras pada saat itu. Ia mengungkapkan jika dulu kita melihat pemimpin-pemimpin itu galak-galak, tetapi justru di situ kita mendapatkan pelajaran yang sangat banyak. Ia pernah menjadi anak buahnya Duta Besar Arizal Effendi (ketika itu Dirjen), orangnya sangat keras, sangat *straight*, tapi pada saat yang sama, ia belajar banyak dari beliau. Retno pernah dibesarkan oleh Duta Besar Abdul Irsan, yang juga keras, tetapi ia belajar banyak dari beliau. Ia juga pernah dibesarkan oleh Duta Besar Yuwana yang juga sangat keras. Jadi ia merasa seperti dimasukkan ke dalam kawah candradimuko yang habis-habisan, tetapi pada akhirnya ia belajar banyak hal dari mereka.

Menutup perbincangan Retno mengatakan ke depan siapapun yang akan duduk di posisi nomor satu, ia merasa kita tidak akan mengalami *setback* karena Kementerian Luar Negeri adalah kementerian yang sangat terbuka, ekspos kita ke dunia luar sangat terbuka. Kita tahu persis bahwa masalah pengarusutamaan gender adalah isu internasional yang kita tidak bisa mundur, dan kebetulan memang kebijakan pemerintah kita sangat mendukung isu ini. Karena itu ia yakin siapapun yang akan duduk di kursi Menlu tidak ada pilihan lain selain terus melanjutkan isu *women's empowerment*.



### **Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari**

- Prof. Mayling Oey-Gardiner
- Prof. Rachmi Diah Larasati
  - Prof. Merlyna Lim
- Dr. Kristi Poerwandari
- Dr. Ida Ruwaida Noor
- Dr. Arianti Ina Restiani
- Dr. Phil. Ratna Noviani
- Tracy Wright Webster, PhD.



## ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

**Jurnal Perempuan** (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada ([redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:  
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.  
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:  
[http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational\\_for\\_PSWG\\_en\\_Indonesia.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf)  
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.  
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).  
*KOMPAS*. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.  
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi [redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com) untuk mendapatkan petunjuk.

<b>Catatan Jurnal Perempuan: Apa Kabar Hak Asasi Manusia Perempuan?</b> .....	iii-iv
<b>Artikel / Articles</b>	
• Membumikan Instrumen HAM Internasional: Kajian Kebijakan Hukum yang Melanggar Hak Perempuan / <i>Disseminating International Human Rights Instruments: a Study of Legal Policies that Violates Women's Human Rights</i> .....	81-89
<i>R. Valentina Sagala</i>	
• Apakah ACWC (Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak)? Kajian Instrumen Kebijakan Internasional / <i>What is ACWC (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children)? A Study on the International Policy Instruments</i> .....	91-98
<i>Yuyun Wahyuningrum</i>	
• Status Anak Perempuan dalam Kovenan Internasional: Kajian Advokasi Perkawinan Anak / <i>Status of Girls under International Covenants: a Study of Advocacy of Child-Marriage</i> .....	99-105
<i>Maria Ulfah Anshor</i>	
• Perempuan Membongkar Diplomasi Senyap Beijing+20 & CSW59 New York: Kajian Diplomasi Internasional Ramah Perempuan / <i>Women Disassembling Silent Diplomacy of Beijing+20 &amp; New York CSW59: a Study of Woman-Friendly International Diplomacy</i> .....	107-114
<i>Dwi Ruby Kholifah</i>	
• Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial: Kajian Kovenan Internasional atas Perdagangan Perempuan / <i>Criminalization of Sexual Workers: a Study of International Covenants on Women's Trafficking</i> .....	105-121
<i>Loresnia Brahmana</i>	
• Perdagangan Perempuan dalam Migrasi Internasional: Kajian Diplomasi Indonesia dan Malaysia / <i>Trafficking of Women in International Migration: a Study of Indonesia and Malaysia Diplomacy</i> .....	123-131
<i>Masthuriyah Sa'dan</i>	
• Memperkuat Instrumen Gender dan Agensi Perempuan: Studi Kasus Resiko Bencana di Indonesia, Filipina, dan Korea Selatan / <i>Strengthening Gender Instrument and Women's Agency: a Study of Disaster Risks in Indonesia, Philippine, and South Korea</i> .....	133-138
<i>Dian Lestariningsih</i>	
• Perempuan Buruh Dalam Pasar Internasional: Cinta Ibu, Agensi dan Keragaman Politik Aktivisme / <i>Women's Labors in International Market: Mother's Love, Agency and Plurality of Activism Politics</i> .....	139-147
<i>Dewi Candraningrum</i>	
<b>Wawancara / Interview</b>	
• Patrick Ziegenhain: "Perlu Peningkatan Ekonomi, Perubahan Administratif dan Pola Pikir Sosial Untuk Memperbaiki Status Perempuan di Asia Tenggara" / <i>Patrick Ziegenhain: "The need to increase economy, administrative reformation, and changes of mindset to improve the status of South East Asian women"</i> .....	149-152
<i>Anita Dhewy</i>	
<b>Kata dan Makna / Words and Meanings</b> .....	153-154
<b>Profil / Profile</b>	
• Retno Marsudi: "Diplomasi All-Out Untuk Lindungi Buruh Migran Perempuan" / <i>Retno Marsudi: "All-out diplomacy to protect Indonesian female migrant workers"</i> .....	155-159
<i>Anita Dhewy</i>	
<b>Resensi Buku/ Book Review</b>	
• Pentingnya Memahami Instrumen Gender / <i>Importance of Understanding International Gender Instruments</i>	161-164
<i>Lola Loveita</i>	

